



DAFTAR INVENTARISASI ISU STRATEGIS: MENUJU INDONESIA EMAS 2045

REKOMENDASI KADIN INDONESIA BAGI
CAPRES DAN CAWAPRES 2024-2029



REKOMENDASI ISU STRATEGIS

DIALOG CAPRES BERSAMA KADIN INDONESIA: MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Perjalanan bersama menuju visi Indonesia Emas 2045 membutuhkan konsistensi serta kesinambungan dengan seluruh pemangku kepentingan Indonesia. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah yang telah dicanangkan oleh seluruh pemangku kepentingan, adalah bukti konsistensi bangsa untuk mencapai kemajuan yang adil dan berdaulat. Kadin Indonesia mengapresiasi visi dan misi dari pasangan calon Presiden maupun Wakil Presiden dalam upaya menyejahterakan rakyat serta mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Merujuk pada semangat untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, Kadin Indonesia memandang pentingnya peran pemerintah dalam pengambilan kebijakan untuk peningkatan optimalisasi dunia usaha. Hal tersebut diperlukan untuk mendorong terciptanya iklim dunia usaha yang kondusif, adil, serta berdaulat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kadin Indonesia telah menyusun daftar inventarisasi isu strategis dunia usaha yang diharapkan dapat menjadi bagian daripada pemerintahan yang akan datang. Isu-isu ini adalah rangkaian bersama dari seluruh pemangku kepentingan dunia usaha yang telah dikumpulkan melalui semangat inklusivitas bersama. Kadin Indonesia percaya bahwa dengan memperhatikan lebih jauh isu-isu strategis ini, maka pembangunan ekonomi yang berkesinambungan menuju Indonesia Emas 2045 dapat kita capai bersama.

Kompilasi pertanyaan-pertanyaan di bawah ini disusun dengan metode: (1). Clustering permasalahan industri berdasarkan data hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Bidang Asosiasi Kadin Indonesia dengan total 400 isu; (2). Survei kepada Pengurus Kadin Indonesia dan Anggota Luar Biasa (ALB) yang dilakukan pada tanggal 15-17 Desember 2023 yang mengumpulkan 57 responden dan 285 masukan; (3). Diskusi internal dengan Komite Tetap Kadin Indonesia pada tanggal 18 Desember 2023. Isu-isu ini penting untuk diselesaikan sekarang dan dalam 5 tahun kedepan karena akan berdampak positif untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Adapun pembagian tematik pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dikelompokkan berdasarkan Peta Jalan Indonesia Emas 2045.

RESILIENSI

Ketahanan Pangan

- **Produktivitas Petani dan Daya Saing:** Daya saing sektor pertanian Indonesia dapat dikatakan lemah karena adanya sejumlah tantangan seperti ekosistem yang belum maksimal dan faktor produksi yang rendah, seperti contohnya makin sedikitnya petani usia muda, berkurangnya lahan garapan yang mengakibatkan meningkatnya jumlah petani gurem, akses keuangan yang buruk, harga input yang tinggi, teknologi rendah, dan jaringan perdagangan berlapis sebagai distributor.
- **Teknologi Pertanian:** Dibutuhkan strategi dan langkah untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui pengembangan agroindustri yang pada akhirnya juga ikut meningkatkan pendapatan petani dan modernisasi pertanian. Hal ini menandakan pentingnya adopsi teknologi tinggi dalam pangan, penggunaan data tentang cadangan dan impor untuk memastikan stabilitas harga, memberdayakan petani melalui model kerjasama lintas sektor dan mendorong inovasi teknologi pertanian.
- **Food Estate:** Untuk meningkatkan implementasi *Food Estate* di Indonesia, diperlukan penguatan koordinasi antara *stakeholder*, inovasi teknologi pertanian, pemberdayaan petani, keberlanjutan lingkungan, kemitraan internasional, infrastruktur pendukung, pengelolaan risiko bencana, partisipasi masyarakat, dan monitoring berkelanjutan. Dengan memprioritaskan aspek-aspek ini, diharapkan *Food Estate* dapat berjalan efisien dan berkelanjutan, memberikan manfaat maksimal bagi petani dan masyarakat lokal.
- **Impor VS Produksi Domestik:** Reduksi impor komoditas pangan dapat dicapai dengan memperkuat produksi lokal dan mendorong adopsi teknologi modern oleh petani. Untuk benih maupun produk yang tidak dapat dipenuhi oleh lokal, diperlukan adanya regulasi khusus sehingga keberlanjutan industri

dapat terus berjalan tanpa terkendala peraturan pelarangan impor yang bersifat umum dan menyeluruh.

- **Kemudahan Impor:** Diperlukan kemudahan impor untuk produk-produk kualitas tinggi yang belum dapat diproduksi di Indonesia. Diperlukan regulasi khusus atau mempermudah regulasi yang sudah ada untuk mendukung kemudahan impor, guna memenuhi kebutuhan pasar dan meningkatkan ketersediaan produk berkualitas dalam negeri.
- **Komoditas Strategis:** Dalam melindungi komoditas strategis seperti kelapa sawit, tembakau, dan bahan tambang, perlu langkah berimbang yang memperhatikan aspek lingkungan dan kesehatan. Inovasi teknologi dan regulasi ketat mendukung praktik berkelanjutan dan pematuhan terhadap standar global. Kolaborasi dengan negara-negara mitra penting untuk mencapai kesepakatan terkait praktik terbaik. Dengan pendekatan holistik ini, Indonesia dapat menjaga kontribusi ekonomi sektor-sektor tersebut sambil menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
- **Data Pertanian:** Terdapat permasalahan ketidaksesuaian data pertanian, terutama data produksi dan luas lahan, dengan kondisi lapangan yang sebenarnya. Diperlukan evaluasi dan perbaikan pada sistem pelaporan pertanian. Diperlukan juga penyempurnaan *One Map Policy* dan Tata Ruang, narasi tunggal per komoditas.

Industri Farmasi dan Alat Kesehatan

- **Roadmap Substitusi Impor dan Research and Development (R&D):** Disarankan untuk merancang *roadmap* jangka panjang dalam mencapai kemandirian bahan baku farmasi dan alat kesehatan dengan melibatkan pemangku kepentingan terutama dalam hal Penelitian dan Pengembangan (*Research and Development/R&D*), dalam hal ini, kolaborasi dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi dapat mempercepat pengembangan kapasitas lokal.
- **Investasi pada Bidang Kesehatan:** Untuk tujuan jangka panjang dan mengantisipasi krisis di industri kesehatan, perlu peningkatan investasi signifikan. Fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penelitian. Kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga internasional dapat meningkatkan daya tangkal industri kesehatan. Investasi yang besar akan memperkuat fondasi dan meningkatkan ketahanan terhadap tantangan industri masa depan.

KESEJAHTERAAN

Industri Manufaktur

- **Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Strategi Substitusi Impor:** Perlunya pendekatan holistik untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor. Disarankan untuk membentuk forum dialog antara pemerintah, industri, dan lembaga riset guna merancang strategi jangka panjang untuk mencapai substitusi bahan baku impor. Penerapan kebijakan insentif, regulasi yang mendukung, dan peningkatan investasi dalam sektor-sektor kunci dapat membantu mengurangi ketergantungan pada impor. *Monitoring* dan evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan efektivitas strategi dan mengidentifikasi area perbaikan. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat mengoptimalkan TKDN dan mengarahkan strategi substitusi impor secara inklusif dan berkelanjutan.
- **Evaluasi Regulasi:** Mengusulkan untuk mengevaluasi regulasi yang melarang impor tertentu sehingga menyebabkan permasalahan operasional dalam beberapa industri, dengan tujuan menciptakan kebijakan yang seimbang untuk mendukung keberlangsungan industri yang sedang berjalan sehingga menghasilkan solusi yang adil dan sesuai dengan peraturan internasional untuk mendukung keberlanjutan dan daya saing industri manufaktur.
- **Hilirisasi Industri:** Mengidentifikasi sektor atau produk potensial untuk hilirisasi industri dapat difokuskan pada pengembangan industri teknologi tinggi, produksi peralatan medis, dan elektronik di sektor manufaktur. Potensi juga terdapat dalam sektor agroindustri, seperti pengolahan produk pertanian dan pengembangan makanan fungsional. Dukungan inovasi, riset, pelatihan sumber daya manusia, serta kebijakan progresif dan kolaborasi dengan sektor swasta adalah kunci sukses dalam mengembangkan nilai tambah dan meningkatkan daya saing global.

- **Industri 4.0:** Mendorong penerapan Industri 4.0, meskipun sumber daya manusia (SDM) perlu peningkatan keterampilan untuk mengimbangi perkembangan teknologi. Pemerintah perlu melibatkan swasta dalam penguatan pendidikan dan pelatihan, kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan fokus pada inovasi serta inklusivitas digital. *Monitoring* dan evaluasi rutin diperlukan untuk memastikan keselarasan antara perkembangan industri dan peningkatan kesiapan SDM. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat optimal dalam menghadapi era Industri 4.0 secara inklusif dan berkelanjutan.

Kewirausahaan atau Struktur Usaha

- **Integrasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM):** Diusulkan untuk menyusun kebijakan yang bersifat inklusif, memfasilitasi integrasi UMKM ke dalam rantai pasok global melalui pembentukan kemitraan strategis dan akses yang memadai terhadap sumber daya.
- **Dukungan Lingkungan:** Penciptaan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bisnis kecil dan menengah serta integrasi mereka ke pasar global.
- **Insentif:** Memberikan insentif fiskal dan non-fiskal yang signifikan, seperti pembebasan pajak dan akses ke pembiayaan yang terjangkau, untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi UMKM.
- **Inclusive Closed Loop:** Mendorong perusahaan besar untuk mengambil peran global dengan memperhatikan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Serta memaksimalkan peran dalam *Inclusive Closed Loop* untuk membantu pengembangan UMKM.
- **Inovasi Digital:** Inovasi digital penting untuk UMKM. Dengan *e-commerce*, pembayaran digital, dan pemasaran *online*, UMKM dapat meningkatkan kuantitas, kualitas, dan harga produk. Pelatihan dalam teknologi mendukung efisiensi operasional dan pertumbuhan ekonomi lokal secara inklusif.
- **Perlindungan terhadap Impor dan Investasi Asing:** Perlindungan UMKM dari impor dan investasi asing penting agar tetap prospektif di tengah persaingan global. Kebijakan yang mendukung, penguatan kapasitas, dan perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi kunci keberhasilan untuk memastikan pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan.
- **Database UMKM Unggul:** Perlunya pengumpulan data identitas dan kinerja UMKM binaan seluruh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BUMN/BUMD guna memastikan program pembinaan bergulir dari satu UMKM ke UMKM lainnya dan mempermudah lembaga pembiayaan dan perusahaan besar memilih UMKM yang unggul dan siap dibina masuk rantai pasok.

Rasio Pajak

- **Reformasi Pajak:** Disarankan untuk menyusun reformasi pajak yang menyeluruh, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan dan efisiensi. Strategi yang mencakup penguatan penegakan hukum pajak dan transparansi perlu diperhatikan.
- **Adil dan Berkelanjutan:** Pengusaha taat pajak harus bersaing dengan pengusaha tak taat pajak, sehingga *cost* yang dimiliki berbeda dan berpengaruh terhadap persaingan harga. Pentingnya merumuskan kebijakan pajak yang adil dan berkelanjutan untuk memastikan kontribusi yang seimbang dari semua pihak sehingga menghadirkan persaingan usaha yang sehat.
- **Pendidikan dan Penyuluhan:** Mengusulkan program pendidikan dan penyuluhan pajak yang intensif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta menyelenggarakan dialog terbuka untuk merumuskan kebijakan pajak yang lebih inklusif.

Jasa Keuangan

- **Variasi Produk Keuangan:** Ada stigma orang kaya di Indonesia lebih suka memarkir uang di Singapura. Perlu strategi agar simpanan masyarakat dilakukan di Indonesia daripada di luar negeri. Perlu membuat produk-produk keuangan yang dapat menarik minat konsumen.
- **Inovasi Digital:** perlunya edukasi dan regulasi yang melindungi konsumen, terutama terkait pinjaman *online*.
- **Akses Pada Keuangan Digital:** Perlu strategi untuk mendorong partisipasi masyarakat yang belum mendapat akses pada keuangan digital.

- **Tata Kelola Keuangan Digital:** Dalam ekonomi digital, masih tersebar di beberapa Kementerian atau Lembaga (K/L) yang berbeda dan belum ada lembaga atau K/L payung yang menjadi *host* atau koordinatornya.
- **Edukasi Keuangan Digital:** Penting untuk melakukan edukasi sedini mungkin.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf)

- **Strategi pengembangan Parekraf:** Kontribusi sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih terbelah stagnan dengan rata-rata 5 persen pada sektor pariwisata dan 4 persen pada sektor ekonomi kreatif. Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengalami stagnasi dikarenakan masing-masing sektor memiliki permasalahan yang kompleks, hal ini mengartikan bahwa penggabungan kedua sektor tersebut pada satu sistem pemerintahan belum dinilai efektif. Untuk itu, visi pengelolaan dari pemerintah selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dengan tidak menggabungkan kedua sektor tersebut ataupun mendirikan badan turunan dari masing-masing sektor yang lebih efektif.
- **Promosi Pariwisata:** Pemerintah perlu melahirkan strategi terkait dengan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk meningkatkan dan mempromosikan pariwisata Indonesia, mengingat bahwa meskipun Indonesia memiliki aset parekraf yang melimpah, negara-negara tetangga yang memiliki aset yang lebih sedikit dibandingkan dengan Indonesia berhasil menarik lebih banyak wisatawan dengan masa tinggal yang lebih lama. Hal ini dapat dilakukan melalui mendorong adanya investasi infrastruktur, menjalin kerja sama global dan mendorong adanya kampanye masif.

Industri Olahraga

- **Prioritas:** Menentukan prioritas dalam peningkatan prestasi serta industri olahraga. Industri olahraga Indonesia belum ada yang memiliki standarisasi internasional sehingga industri olahraga belum dapat memberikan insentif untuk negara. Hal ini sejalan dengan stagnasi dari prestasi olahraga Indonesia di berbagai cabang olahraga karena kurangnya pembiayaan dalam program pengembangan atlet. Dengan industri olahraga yang maju, maka prestasi olahraga akan berjalan dengan beriringan. Selain itu, diperlukan juga pembinaan, pemberdayaan, dan peningkatan tenaga kerja dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) di sektor olahraga (Atlet) Indonesia.
- **Insentif:** Diperlukan langkah-langkah seperti pemberian insentif kepada pelaku industri olahraga, investasi dalam fasilitas olahraga, dan promosi program olahraga di tingkat masyarakat. Pentingnya membangun kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan tokoh-tokoh olahraga untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri ini. Tentu hal ini juga diharapkan dapat berpengaruh pada performa para atlet di kancah lokal maupun internasional.

INKLUSIVITAS

Pemerataan Teknologi

- **Roadmap Digitalisasi:** Diperlukan *roadmap* digitalisasi komprehensif untuk memastikan pemerataan teknologi dan inklusivitas ekonomi di seluruh negeri. Diperlukan upaya untuk merancang kebijakan yang mendukung akses digital merata, membangun infrastruktur digital di daerah terpencil, dan memperkuat literasi digital di seluruh lapisan masyarakat. Pentingnya kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan juga harus diperhatikan. Dengan *roadmap* digital yang kokoh, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif di seluruh pelosok tanah air.
- **Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM):** Memastikan perkembangan keterampilan SDM yang merata untuk mengimbangi pemerataan teknologi. Diperlukan kebijakan yang mendukung akses digital, investasi dalam infrastruktur teknologi di daerah terpencil, insentif bagi pelaku usaha yang turut berinvestasi pada penelitian dan pengembangan untuk menggerakkan transfer teknologi yang lebih masif dan peningkatan literasi digital secara menyeluruh. Langkah-langkah ini harus diimplementasikan dengan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan. Dengan demikian, Indonesia dapat memastikan bahwa manfaat digitalisasi dapat dirasakan oleh

seluruh masyarakat dan membawa dampak positif terhadap perkembangan keterampilan dan inklusivitas di berbagai lapisan masyarakat.

- **Cybersecurity:** Perlunya perlindungan data pribadi dari *cybercrime* dan tindakan yang memberi pengaruh negatif pada perekonomian dan usaha mikro Indonesia.

Kesejahteraan Masyarakat Rentan

- **Kesejahteraan Buruh:** Perlu ditempuh langkah-langkah untuk memastikan upah buruh untuk meningkatkan kesejahteraan buruh yang pada akhirnya akan mendukung lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha.

Peran Swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

- **Regulasi:** Mengembangkan regulasi yang memberikan kesempatan setara antara perusahaan swasta dan BUMN. Memastikan penyusunan kerangka kerja dan regulasi yang lebih dinamis untuk mengakomodasi perkembangan industri dan memberikan insentif kepada sektor swasta. Disarankan untuk mengintensifkan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam penugasan BUMN.
- **Transparansi dan Akuntabilitas:** Merumuskan langkah-langkah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam tugas dan tanggung jawab BUMN. Memberikan rekomendasi konkret mengenai peningkatan transparansi dan persaingan yang sehat antara BUMN dan swasta, termasuk pembentukan lembaga independen untuk memantau dan mengevaluasi peran BUMN.

KEBERLANJUTAN (*SUSTAINABILITY*)

Green Economy

- **Kerja Sama:** Pembangunan ekosistem *green economy* yang kondusif ini dapat dicapai dengan meningkatkan kerja sama antara sektor swasta, pemerintah, dan lembaga riset dalam pengembangan teknologi ramah lingkungan.
- **Insentif:** Pentingnya menciptakan insentif dan regulasi yang mendukung investasi di sektor *green economy*, termasuk pemberian insentif pajak dan dukungan finansial.
- **Pelatihan dan Penyuluhan:** Perlu juga ditingkatkan pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) dengan keterampilan yang relevan dalam ekonomi berkelanjutan sehingga masyarakat siap dan secara organik mampu bergeser menuju penerapan *green economy*.

Transisi Energi

- **Peran Swasta:** Melibatkan peran swasta dalam mempercepat transisi energi di Indonesia, terutama dalam *power wheeling*, penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan pemberian insentif kepada swasta, termasuk pembayaran kepada masyarakat lokal. Perlunya kerja sama antara swasta, masyarakat, dan BUMN untuk mendukung produksi listrik terdesentralisasi.
- **Solusi Ekonomi:** Diperlukan strategi untuk fokus pada penyediaan solusi ekonomi untuk masyarakat berpendapatan rendah. Kolaborasi dengan lembaga internasional dan sektor swasta dapat memperkuat langkah-langkah implementasi. Sehingga setiap elemen masyarakat dapat berkontribusi terhadap transisi energi.
- **Insentif:** Mengidentifikasi sumber pembiayaan yang berkelanjutan dan memberikan insentif pajak untuk mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan, sekaligus mempertimbangkan langkah-langkah sosial yang mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakterjangkauan dalam akses energi. Selain itu, diperlukan dorongan agar PLN bisa melaksanakan Permen ESDM perihal pembelian listrik Energi Baru Terbarukan (EBT).

Circularity

- **Peraturan dan *Tipping Fee*:** Memperluas peraturan terkait Pengelolaan Limbah Terpadu (PLT) sampah dalam ekonomi *circular*. Evaluasi *tipping fee* untuk mendukung implementasi ekonomi *circular* tanpa biaya pembuangan, serta perumusan regulasi khusus untuk perlakuan sampah organik dan

anorganik. Langkah-langkah ini dapat mempercepat transisi menuju ekonomi *circular* yang berkelanjutan dan efisien.

- **Insentif:** Mendorong dukungan dari pemerintah terhadap pelaku bisnis daur ulang sampah dengan memberikan insentif dan disinsentif yang lebih efektif. Evaluasi dan penyesuaian mekanisme insentif dan disinsentif diperlukan untuk mendukung keberlanjutan bisnis daur ulang. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan kontribusi pelaku bisnis terhadap pengelolaan limbah secara berkelanjutan.

PENGGERAK (*ENABLERS*)

Sumber Daya Manusia (SDM)

- **Disrupsi tenaga kerja:** Era digitalisasi telah membuka peluang kerja baru, tetapi juga menyebabkan disrupsi tenaga kerja oleh karena itu perlu dilakukan: investasi pada pendidikan dan keterampilan yang berkualitas, mendorong kemitraan dengan universitas dan lembaga pendidikan global, dan memberikan insentif pada sektor swasta yang berinvestasi dalam program *upskilling* dan *reskilling*.
- **Peningkatan *skill*:** *Skill coding* untuk kualitas SDM di masa depan, dan apakah perlu penambahan investasi di bidang pendidikan vokasi untuk *skill* ini.

Infrastruktur

- **Percepatan Pembangunan:** Pemerintah dapat melakukan reformasi birokrasi, seperti dengan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat (*participatory planning*) dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Selain itu, pemerintah juga dapat membentuk forum atau mekanisme kerja sama antarsektor untuk meningkatkan koordinasi.
- **Kemudahan Investasi dalam Pembangunan Infrastruktur:** Pemerintah dapat memberikan insentif pajak kepada perusahaan yang berinvestasi di bidang-bidang yang memiliki nilai tambah tinggi, seperti industri manufaktur, industri kreatif, dan pariwisata.

Antisipasi Urbanisasi

- **Penyusunan yang Inklusif dan Berkelanjutan:** Mengusulkan penyusunan rencana tata ruang kota yang inklusif dan berkelanjutan, melibatkan pemerintah lokal, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Diperlukan strategi yang menyeluruh untuk mengatasi kendala harga rumah, inflasi, dan kapasitas lahan.
- **Insentif:** Merinci inisiatif infrastruktur dan transportasi yang mendukung pengembangan kawasan sub-urban, sekaligus memberikan insentif kepada pengembang yang memprioritaskan aksesibilitas dan keberlanjutan.
- **Daya Dukung dan Daya Tampung:** Dalam melakukan perencanaan sebuah kawasan, perlu memperhatikan kapasitas daya dukung dan daya tampung lahan yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Biaya Logistik

- **Harmonisasi Regulasi:** Menyusun kebijakan yang mengarah pada harmonisasi regulasi logistik, dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses perumusannya. Diperlukan keterlibatan aktif dari sektor swasta untuk menciptakan solusi inovatif dalam mengurangi biaya logistik. Serta mengusulkan pembentukan badan koordinasi logistik melibatkan pemerintah, pelaku industri, dan lembaga riset untuk menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing nasional.
- **Coast Guard:** Mengusulkan dibentuknya *Coast Guard* sebagai penjaga laut dan pantai untuk menjamin kelancaran logistik sehingga dapat menekan biaya logistik dan berdampak pada peningkatan ekonomi nasional.





Informasi lanjutan terkait **pasar internasional** dapat ditemukan di sini:

bsd-kadin.id

WIKI WIRAUSAHA



Temukan informasi menarik bagi **pengembangan bisnis UMKM** di sini:

Wikiwirausaha.id



Temukan layanan **pengurusan dokumen dagang** di sini:

edocs.kadin.id



Ikut bergabung dalam ekosistem **bisnis berkelanjutan** di sini:

Netzerohub.id



Kembangkan kapasitas dan kesempatan meningkatkan jenjang karir di sini:

kadinforaker.id

Kadin Indonesia

Menara Kadin Indonesia Lt. 3, 24, 29, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 | Telp. 021-5274484



DAFTAR INVENTARISASI ISU STRATEGIS: MENUJU INDONESIA EMAS 2045

REKOMENDASI KADIN INDONESIA BAGI
CAPRES DAN CAWAPRES 2024-2029

